

**PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN KARENA KERUGIAN PERUSAHAAN
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di FC SMART Jl. Tengku Umar N0.8 Bumi Kedaton, Bandar Lampung)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NASRULLOH
NPM. 1621030402**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Salah satu bentuk *mu'amalat* yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disitu pihak sebagai penyedia jasa dipihak lain menyediakan pekerjaan dan upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan yang terjadi di perusahaan **FC SMART**, JLN TENGKU UMAR NO 8, BUMI KEDATON, BANDAR LAMPUNG. Dimana dalam upah tersebut kurang dari nominal yang ditentukan di karenakan kerugian yang ditanggung oleh para karyawan, adapun kondisi diperusahaan tersebut sangatlah serba canggih karena sistem input barang menggunakan sistem komputer sehingga mempermudah karyawan dalam mengecek barang, akan tetapi banyaknya pemesanan semakin meningkat sehingga keteledoran karyawan ada saja entah karena barang kurang atau salah kasih barang bahkan salah mengembalikan uang kembalian. karena dalam hal ini menimbulkan kerugian oleh perusahaan tersebut dikarenakan banyaknya pelanggan yang komplek terhadap kesalahan atau keterledoran karyawan. tetapi perusahaan itu tidak mengganti kerugiannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus . Dalam hal penelitian ini mengamati permasalahan yang ada yaitu bagaimana mekanisme pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan di perusahaan FC SMART Jln Tengku Umar no 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau mekanisme pemotongan upah karyawan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemotongan upah terhadap kerugian perusahaan. di FC SMART Jalan Tengku Umar no 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif analisis, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Sampel dari penelitian ini adalah karyawan. Hasil dari penelitian diatas, bahwa benar perusahaan Fc Smart menerapkan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan dan pada mekanisme pelaksanaannya dilapangan pemotongan upah itu dilakukan bila terjadi minus akibat keteledoran karyawan, maka dilakukanlah pemotongan saat penerima upah yaitu upah pokok yang dikurangi sebesar kerugian dengan dibagi rata setiap tim yang minus tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam pemotongan upah karyawan atas kerugian perusahaan tersebut dikarenakan keteledoran karyawan diperbolehkan, karena aturan yang didasarkan peraturan kerja secara lisan sebelum karyawan memulai kerjanya dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun aqadnya. Dengan adanya peraturan tersebut juga dapat menimbulkan kemashlahatan antara kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan, dimana kerugian tersebut ditanggung tim sehingga meringankan karyawan dalam mengatasinya.

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRULLOH

NPM : 1621030402

Jurusan/prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam. (Studi kasus di FC SMART Jl. Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung).”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2020
Penulis,

Nasrulloh
NPM.1621030402



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama mahasiswa : **NASRULLOH**

NPM : **1621030402**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

Judul Skripsi : **Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Fans Cell Jl Tengku Umar N0.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag
NIP. 195607271988031001

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP.

KETUA JURUSAN

Khoiruddin, M.S.I
NIP.19780725200921002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Fans Cell Smart Jl Tengku Umar Bumi Kedaton Bandar Lampung)
disusun oleh: NASRULLOH NPM: 1621030402, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. pada Hari/Tanggal: Rabu 21 Oktober 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)

Penguji Utama: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM. 196210211993031002**

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجِرْهُ ^طإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah satu dari wanita itu berkata :” Wahai bapakku ambillah dari sebagian pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

(Q.S Al-Qashash : 26)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas takdirmu telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, serta dengan ridhomu pulalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karena itu aku ucapkan rasa syukur dan terimakasih juga kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, bapak (alm) Syaifuddin KR dan ibu Siti Masturoh yang telah dengan tulus dan sabar membesarkan, membiayai dan mendo'akan setiap saat untukku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung. Sesungguhnya aku bisa bertahan dan seperti ini salah satunya adalah berkat kalian berdua, semoga kelak aku dapat membahagiakan kalian dan semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan kemuliaan kalian. Aamiin.
2. Saudara-saudaraku tercinta, kakakku Masropah dan suaminya Diki Rizal, adikku Sri Wahyuni yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, memberi banyak ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga telah mendewasakanku dalam berfikir agar selalu dapat berperilaku yang baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap NASRULLOH, dilahirkan di wayhalom Tanggamus pada tanggal 15 Oktober 1996. Anak kedua dari tiga bersaudara, dengan seorang ayah yang bernama (alm) Syaifuddin KR dan seorang ibu bernama Siti Masturoh. Untuk pertama kalinya menempuh pendidikan di:

1. SD Negeri 1 Wayhalom Talang Padang Tanggamus, Lulus tahun 2009.
2. SMP/MTS Ponpes Darussalam Gontor 9 Kalianda Lampung Selatan.
3. SMA/MAN Ponpes Darussalam Gontor 2 Ponorogo Jawa Timur, Lulus Tahun 2015.

Pada tahun 2016, Alhamdulillah terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, 21 Oktober 2020

Nasrulloh
NPM.1621030402

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan”(studi FC Smart Jl Tengku Umar No8 Bumi Kedaton Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah pada program Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan, baik moril maupun materil dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.KH Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M,Si. Selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Lampung.
4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. Dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran

dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak, ibu, kakak, adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
8. Pemilik dan staff perusahaan Fc Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, satu atap kosan Rahmatullah, Fadhil, Andre, Firnando, Fikri, Agung, dan Sandi. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, dan kelas F khususnya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh

karena, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islaman.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 Oktober 2020

Nasrulloh
NPM 1621030402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Islam	16
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun Akad.....	18
4. Syarat-Syarat Akad.....	19
5. Jenis-Jenis Akad	25
6. Asas Berakad.....	26
7. Sebab-Sebab Akad Berakhir	28
B. Ijarah	31
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	31
2. Legalitas dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	33
3. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	38
4. Berakhirnya <i>ijarah</i>	40

C. Upah Dalam Islam	41
1. Pengertian Upah	41
2. Dasar Hukum Upah	42
3. Rukun Upah.....	45
4. Syarat-Syarat Upah.....	47
5. Penentuan Upah.....	48
6. Betuk Upah.....	51
7. Pembayaran Upah dan Sewa	51
8. Tata Cara pembayaran Upah menurut Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 Tentang perlindungan Upah	52
D. Tinjauan Pustaka.....	53

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan FC SMART Jl Tengku Umar Bumi Kedaton, Bandar Lampung	56
1. Sejarah Singkat Berdiri Fc Smart	56
2. Visi dan Budaya Perusahaan	57
3. Bentuk dan Perjanjian di Perusahaan Fc Smart.....	57
4. Struktur Organisasi	58
B. Mekanisme Pemotongan Upah Karyawan karena Kerugian Perusahaan di Fc Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung	64
1. Mekanisme pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan.....	64

BAB IV: ANALISIS DATA

A. Mekanisme Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan di Fc Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan di Fc Smart Bumi Kedaton Bandar lampung	73

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Perusahaan FC Smart	59
2. Nama Staff di Perusahaan Fc Smart.....	59
3. Nama Pembantu staff di Perusahaan Fc Smart	60
4. Data Kerugian Perusahaan Bulanan Perusahaan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Lampung

Lampiran 2 : Surat Izin Riset di Perusahaan Fc Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 : Blangko Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul dijadikan sebagai kerangka awal dalam sebuah skripsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membaca sebuah skripsi di lihat dari judulnya terlebih dahulu, ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya penguraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan suatu proses penekanan pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, **”Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Fc Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung)**. Untuk perlu diartikan pengertian dari istilah-istilah judul diatas sebagai berikut:

1. Pemotongan merupakan proses pengurangan (mengurangi).¹ Pengurangan upah/gaji karyawan atas kerugian perusahaan yang terjadi di Fc Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung.
2. Upah ialah bagian dari penghasilan masyarakat yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam produksi atau harga yang dibayarkan pengusaha

¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),h. 1096.

kepada para pekerjanya dalam penggunaan tenaga kerja mereka. Upah dapat diwujudkan dalam bentuk uang dan barang-barang.²

3. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; buruh; pekerja.³
4. Kerugian adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan), menanggung atau menderita rugi.⁴ Dan kerugian ini terjadi dikarenakan keteledoran dari karyawan sendiri akan tetapi kerugian ini ditanggung oleh semua karyawan sehingga karyawan yang tidak melakukan keteledoran terkena untuk membayar kerugian tersebut.
5. Perusahaan dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap serta terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.⁵ Fc Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung merupakan salah satu perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang, perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa.⁶

² G.Kartasapoetra Danny R. Agoes Rakhmat, *Ilmu Ekonomi Umum* (Bandung : Armico, 1982), h.120.

³ *Ibid*, h.645.

⁴ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Ibid*, h.

⁵ Zaeni Asyhadie. Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga. 2012), h.36.

⁶ *Ibid*, h. 37.

Fc Smart merupakan perusahaan yang menyediakan berupa barang/jasa kouta internet, pulsa listrik dan lain-lain.

6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan bagi Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan kenapa penulis memilih judul ini antara lain:

1. Alasan Objektif

Banyaknya persaingan dalam mencari pekerjaan, sehingga dalam dunia pekerjaan yang biasanya memiliki kesempatan antara pekerja dan pemberi jasa begitu sulit sehingga pekerja menerima apapun keputusan dari pemberi jasa. Sehingga dalam praktek upah mengupah yang terjadi di Fc Smart Jln Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung dimana dalam upah atau gaji tersebut kurang dari nominal yang ditentukan di karenakan kerugian yang ditanggung oleh para karyawan, pelaksanaan upah ini dapat menimbulkan kerugian dan ketidakrelaan salah satu pihak. Meskipun hal tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduanya, namun hal tersebut dapat mendatangkan kemudaratn karena adanya kerugian dari pihak pegawai sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah

⁷ Syarifuddin, Amir, *usul fiqh*, cetakan kesatu, (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5

ditetapkan bahwa syarat *ijarah* atau *ujrah* menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ujrah* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan ruang lingkup objek permasalahan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, berdasarkan data dari jurusan, sehingga dapat memungkinkan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi ataupun *ukhrowi* sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadi bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *mu'amalah*.⁸ *mu'amalah* adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang

⁸ Rahmat Syafi'I, *Asas-Asas Hukum Mua'malat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000), h.7.

paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan *muamalah* adalah sistem kerjasama pengupahan.⁹

Berkaitan dengan hal ini Seperti yang terjadi di perusahaan Fc Smart, Jln Tengku Umar No 8, Bumi kedaton, Bandar Lampung merupakan sebuah perusahaan perseorangan yang terletak di Lampung dan merupakan perusahaan IT (informasi teknologi) dibidang paket data dan pulsa listrik maupun pulsa elektrik. Dan sistem upah atau gaji tersebut kurang dari nominal yang ditentukan faktor kerugian. Sedangkan kerugian tersebut ditanggungkan kepada para karyawan diperusahan FC Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung, dikarnakan keteledoran salah satu karyawan.

Pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan diperusahaan Fc Smart Bumi Kedaton Bandar Lampung dilakukan setiap akhir bulan. Akan tetapi karena terjadi kesalahan karyawan maka setiap bulannya terjadi minus di perusahan tersebut sehingga terjadilah pemotongan upah terhadap karyawan. Adapun kondisi di Perusahaan tersebut sangatlah serba canggih karena sistem input barang menggunakan sistem komputer sehingga mempermudah karyawan dalam mengecek barang, akan tetapi banyaknya pemesanan semakin meningkat sehingga keteledoran karyawan ada saja di karena barang kurang atau salah kasih barang bahkan salah mengembalikan uang kembalian. Karena dalam hal ini menimbulkan kerugian oleh perusahaan tersebut dikarnakan banyaknya pelanggan yang komplek terhadap kesalahan atau keteredoran karyawan. tetapi perusahaan itu tidak mengganti

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h.2

kerugiannya namun karyawan yang menanggung kerugiannya tersebut. Meskipun hal tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduanya, namun hal tersebut dapat mendatangkan kemudahan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dikarenakan kesalahan oleh oknum karyawan. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa syarat *ijarah* atau *ujrah* menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ujrah* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atas upah timbul dari perjanjian kerja. Perusahaan tersebut menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawan. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.¹⁰ Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila syarat tidak terpenuhi salah satu pihak membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.¹¹

¹⁰ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.1.

¹¹ R. Subekti, dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Padya Paramita, 2008), h.339.

Namun permasalahan yang sering terjadi di perusahaan Fc Smart Bumi kedaton Bandar Lampung yaitu saat pembayaran upah kepada karyawannya kurang nominal yang ditentukan sehingga kerugian perusahaan tersebut karyawanlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tau mendalam tentang mekanisme pembayaran upah kepada para karyawan, oleh sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan “Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Fc Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung)”

D. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam skripsi ini berfokus bagaimana mekanisme pemotongan upah karena kerugian perusahaan, sehingga kerugian perusahaan ditanggung karyawan. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yang benar atau belum.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di Fc Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar lampung?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di FC Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah diatas bisa diambil tujuan dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di Fc Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar lampung.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme pemotongan upah dilibatkan kepada karyawan atas kerugian perusahaan di FC Smart Jln Tengku Umar No.8 Bumi Kedaton Bandar Lampung.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini sangat berguna untuk masyarakat, khususnya perusahaan Fc smart dalam sistem pengupahan (*ijarah*) dan menambah wawasan dan ilmu mengenai pengupahan yang baik dan benar menurut *Syara'*
 - b. Secara praktis, penelitian ini bermaksud untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Secara umum dikategorikan dua signifikansi atau manfaat penelitian yaitu diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹² Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian Data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terhadap responden

¹² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.2-3

dilakukan dilapangan atau dikancah kehidupan sebenarnya.¹³ Dari segi datanya penelitian ini termaksud penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat proposal, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan langsung dari hasil wawancara, pengamatan

¹³ Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat* (Jogjakarta: Paradigma, 2005), h.54

¹⁴ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), h.100.

¹⁵ *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat, Ibid*, h.58.

¹⁶ *Ibid*, h.68.

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1998) h.78

dan penelaahan dokumen yang di terima dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara terhadap semua karyawan FC Smart Jl Tengku Umar No 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁹ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama, adapun populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan dari karyawan Fc Smart bumi kedaton Bandar Lampung yang terdiri dari staff pulsa dan kouta yang terdiri 10 karyawan yang sudah lama di perusahaan.

¹⁸ Sedermayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: MandarMaju, 2002), h. 73

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

b. Sampel

Bagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* atau sampling yang poposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dapat sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang terdiri 5 orang karyawan staff khusus perusahaan yaitu karyawan yang terkena potongan oleh perusahaan Fc Smart Jl Tengku Umar No8 Bumi Kedaton Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengandung makna pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data-data tertentu. Sumber utama dari penelitian ini adalah aktifitas obyek penelitian lapangan yang merupakan data primer. Selain itu juga didapatkan dari data tambahan berupa dokumen file dan didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk memperoleh data primer yang diinginkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk

²⁰ Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Tehnologi UGM, 1986) h.27.

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²¹ Metode wawancara merupakan metode yang utama dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada karyawan Fc Smart Jl Tengku Umar no 8 Bumi Kedaton Bandar Lampung. Yang terdiri dari 15 karyawan akan tetapi dimasa pandemik COVID19 ini peneliti hanya mewancarai sebagian yang terdiri 5 staf khusus perusahaan yaitu uni (oprasional manajer), Abdurahman (staff kouta), Riswan (staf gudang), bayu (staff pengecekan barang) Irwansyah (staff pulsa). Suatu pecakapan atau Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada permasalahan tertentu.

b. Observasi

Menurut S. Margono Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²² Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, untuh dan akurat. Observasi dilakukan pada tiga waktu yaitu saat terjadi, proses kerja. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

²¹ *Ibid*, h.137.

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara,2007) h. 173.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menggumpulkan data dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.²³ Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung dari data wawancara.

5. Metode Pengolaan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun dari studi *literature* yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penandaan data (*Coding*), pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok pembahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.

²³ Husaini Usman *Ibid*, h.137.

c. *Sistematicing*, melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitiannya, kemudian dianalisa pula kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu tidak seperti lainnya, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi.²⁵ Metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu metode analisis data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁴ Neor Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.17.

²⁵ *Ibid*, h.130

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

¹ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian kesepakatan atau transaksi adapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.²

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan atau pihak seperti wakaf, pembebasan, talak, atau bersumber dari pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.³

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-uqud* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia.2012).h.71.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 35

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 46

syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas dapat mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan, pertama dalam *ijab qabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁴ Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵

2. Dasar Hukum Akad

Ibnu Tarimiyah dalam *al-fatwa al-kubra'* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Hudein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu harus ditepati karena *syara'* sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.⁶

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil menunjukan keumuman wajibnya memenuhi akad” adalah sebagai berikut:

- a. Surat Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

⁴ Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), h.247.

⁵ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007) h. 68.

⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Rosda, 2016), h.7

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S Al-Maidah (5): 1)⁷

b. Surat Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwalah, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Imran (3):76)

c. Surat Al-Anfal (8): 58

وَأِمَّا تَخَافُ ۖ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ۖ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”(Q.S. Al-Anfal (8): 58)

3. Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asas dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

a) *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Kumudasmor Grafindo, 1994), h. 156

itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli.

- b) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.⁸
- c) *Al-ma'qud alaihi* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak
- d) Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya dalam akad *ijarah* tujuannya adalah memiliki manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.⁹

4. Syarat-Syarat Akad

- a) Syarat terjadinya akad (*in'aqad*)

Syarat *in'aqad* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut *syara'*. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu :

⁸ Suhendri Hendi, *ibid*, h 48

⁹Mardani, *Ibid*, h. 72-73.

- 1) Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi *shighat*, *aqid*, dan *ma'qud alaihi*.
- 2) Syarat khusus syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murabah* dan *salam*.

b) Syarat sah akad

Yaitu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi *fasid*. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari *'aib* (cacat) barang.

c) Syarat kelangsungan akad (*nazaf*)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu :

- 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak biasa dilangsungkan, ia menjadi *mauquf* (ditangguhkan).
- 2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain didalam objek akad, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.

d) Syarat *luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan *ijarah*. Untuk *lazim*nya suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyar* bagi para pihak yang memungkinkan di fasakkannya akad oleh salah satu pihak

yang berakad. Apabila didalam akad hak *khiyar*, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hal *khiyar* tersebut.¹⁰

5. Jenis- jenis Akad

Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu

a. Akad yang legal (sah)

- 1) Bentuk dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/ *shigaht*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad)
- 2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*

b. Akad yang tidak legal

- 1) Bentuk dasar akad yang tidak legal yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shigat*, pelaku akad dan tujuan akad.
- 2) Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang *syara'* seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad itu adakalanya terkait pada rukun dan syarat akad, dan ada kalanya terikat pada sifat-sifat yang harus dipenuhi¹¹.

¹⁰ Rozalinda, *Fukih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan syariah* (Jakarta: rajawali Pers, 2007), h.52-53.

6. Asas Berakad

a. Asas Ibadah (*mabda' al-iabadah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebut dalam dalil-dalil Syariah.

b. Asas Kebebasan Berakad (*mabda' hurriyyah at-Ta'áqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil.

c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar- Radha'íyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan terciptanya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

¹¹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Syariah* (Jakarta: Rajawali Per, 2016), h.95-96

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul Fiqih*, “perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib”

e. Asas Keseimbangan (*Mabda'at-Tawazun fi al-mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemasahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*)

g. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitas ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang menegaskan, “berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”¹²

7. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad

a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.”

Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut:

1. Akad yang tidak *lazim* (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selamat tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di*fasakh*.
2. *Fasakh* dengan sebab *Khiyar* (pilihan). Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh men-*fasakh*-kan akad. Tetapi pada *khiyar aibi* (aib) kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh men-*fasakh*-kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 83-92.

3. *Fasakh* dengan *Iqalah* (pilihan). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari maka dia boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan pihak lain.

4. *Uyub* ridha (cacat ridha)

5. Syarat dan sebab *fasakh*

Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila syarat-syarat berikut:

- a) Kontrak yang akan *fasakh* harus bersifat mengikat apabila terpenuhi belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*muawadhah*)
- b) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar kontrak difasakh, diputuskan.
- c) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi *ghalath* (keliruan), *ikrah* (pemaksaan) dan *tadlis* (penipuan), ia

memiliki hak untuk meminta agar kontrak di *fasakh*, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.¹³

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.¹⁴

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu *bai'al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat. Sementara *ijarah* menurut istilah adalah: “akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu”¹⁵

Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk

¹³ Oni Sahroni, M hasanuddin, *fikih muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implemantasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) h.185-186.

¹⁴ Darsono, Ali sakti, Siti Astiyah, Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.54-55

¹⁵ *Ibid*, h.129.

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.¹⁶ *Ijarah* atau sewa dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan pembayaran, tetapi merupakan pembiayaan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para Ulama fiqih, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.”
2. Menurut Ulama Malikiyah *ijarah* ialah “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”¹⁸
3. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”¹⁹

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.99.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h.29.

¹⁸ Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah.....*,h. 114.

¹⁹ *Ibid.*, h.115

4. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan (jelas).”²⁰

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengganti (kompensasi/upah). Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya akad *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqoh*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹ Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma.²²

²⁰Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala- Al-Mazhab Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr,1991), h,98.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 277.

²² Imam Mustofa, S.H.I, M.SI, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h. 103.

1) Al-Qur'an

a. Surat At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya:”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S At-Talaq : 6)

b. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:233)

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orangtua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.²³ Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008) h.155.

dengan catatan harus memberikan upah. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menunaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

c. Surat Az-Zukruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf:32).

“saling mempergunakan” memiliki arti “supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama ;lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, Karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain” Dalam hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melakukannya akad *ijarah*.

2) Hadits

1. Hadits tentang pembayaran upah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : Dari Sa'id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah SWT berfirman, tiga golongan, aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat; (1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya.²⁴

Hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

2. Hadits tentang penentuan upah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نُكْرِئُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhari, Juz III* (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1992) h. 57.

السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالمَاءِ مِنْهَا, فَتَمَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابوداود)

Artinya : diriwayatkan dari ustman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurahman bin Haris bin Hisyam, Abdurahman bin Abi Laibah dari Sa'íd bin Al-musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak” (HR. Abu Daud)²⁵

Hadist di atas memberikan gambaran tentang praktek pengupahan dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* telah dipraktikkan oleh Rasulullah telah memberinya aturannya, sehingga akad *ijarah* sah dilakukan dan dibenarkan

3. Hadits tentang penentuan standar upah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudry, bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk memperkerjakan seorang sehingga dijelaskan kadar upahnya, beliau juga melarang dual beli *najasy*

²⁵ Imam Abu Daud, *Sunah Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996) h.84

(dual beli rekayasa untuk menarik para pembeli yang lain) lean melarang jual beli *ilqa'hajar* (sepekulasi Dengan melempar terhadap barang yang mau dibeli) (H.R Ahmad 11139, 11222, 11248, dan Nasa'I 3797).²⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin memperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan diterima pekerja dan menghindari masala-masalah yang akan timbul dikemudian hari.

3) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia²⁷ dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan.²⁸

Dan ketiga sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma semakin memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

²⁶ Muhammad Abduts Salam Tsafi, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu hanbali, Juz iii*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah) h.84.

²⁷ Rachmat Safi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 124.

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Miftahul Khairi *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

3. Jenis-Jenis *Ijarah*

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkejakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau *property*, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau *property* tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *Mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.²⁹

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah* yakni :

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar

²⁹ *Ibid*, h.99.

keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Ketentuan umum ini dapat dilihat pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.

- b. Didalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *mua'jir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan salah satu sifat yang amat dicela agama. Dalam rangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijarah*, sehingga diantara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
- c. Sesuatu yang dijadikan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan, berikut segala manfaatnya.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau pemburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama; seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan

menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* biasa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah asalkan dilakukan atas kelelahan dan kejujuran.³⁰

4. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak biasa diwariskan. Akan tetapi menurut

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). H. 36.

jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

- c. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang yang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.³¹

C. Upah

1. Pengertian upah

Upah menurut istilah terminologi, upah adalah mengambil manfaat orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.238.

diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³² Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'alan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyetakan bahwa *al-ja'alu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu yang ia lakukan.³³

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

2. Hukum Upah

Dasar dasar hukum atau rujukan *ijarah/upah* adalah Al-Qur'an Al-Sunnah, Al-Ijma.

- a. Dasar hukum Al-Qur'an merupakan sendi dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum Syari'at, merupakan undang-undang dasar, sumber dari

³² Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung), h. 149

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia. 2012). h. 311.

³⁴ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

segala sumber dan dasar dari semua dasar.³⁵ Dasar hukum *ijarah*/upah dari Al-Qur'an adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Al-Thalaq:6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَتِ أُسْتَجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجِرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah satu dari wanita itu berkata :” Wahai bapakku ambillah dari sebagian pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash : 26)

Akad *ijarah* dibolehkan dalam hukum Islam. Dalilnya adalah Q.S Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “penyeruh-penyeruh itu berkata : “kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika)h.10.

b. Dasar hukum Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqriyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.³⁶ Hadist Riwayat Abu Sa'ad al-Khudry r.a. bahwa sejumlah sahabat Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan arab, namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, pemimpin mereka digigit ular (atau disengat serangga). Lalu mereka bertanya, “apakah diantara kalian ada yang ahli rukiyyah?” para sahabat menjawab, “kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kami pun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberikan imbalan. Lalu, mereka menjanjikan sejumlah kambing (kira-kira 30 ekor) kepada para sahabat sebagai upah. Seseorang sahabat mulai membaca surat *al-Fatihah*, kemudian ia mengumpulkan ludah dan diusapkan (pada bagian yang terluka). Lalu, orang itu sembuh dan merekapun memberikan sejumlah kambing itu kepada para sahabat. Namun, para sahabat berkata, “kami tidak akan mengembalikan kambing-kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW.” Beliau tertawa dan bersabda, “kalian tahu dari mana bahwa surat itu adalah

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h. 97

rukiah? Ambillah upah tersebut dan berikan aku bagian”. (HR. Imam Bukhari).³⁷

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”
(Riwayat Ibnu Majah).

Hadist Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu:

1. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, professional, dan sungguh-sungguh. Hal ini disyaratkan secara simbolis Dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat.”
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.³⁸

Buruh atau karyawan mempunyai hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh majikan, sebagai konsekuensi sama-sama sebagai manusia. Majikan tidak boleh melakukan eksploitasi (menzalimi) buruh, dan harus memberikan haknya begitupun Dengan buruh staf karyawan harus bekerja keras sesuai kesepakatan kerja.

³⁷ Mardani, *Ibid*.h.312

³⁸ Amirur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, h,25

3. Rukun-Rukun Upah

Rukun Upah ada empat yaitu :

- a) *Aqidaini* (dua orang yang berakad) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* ialah orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b) *Shighat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qobul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qobul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qobul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau *ijab qobul*. Jika sudah terjadi *ijab qobul* sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya, maka akad dan kesempatan antara kedua belah pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati.³⁹
- c) Manfaatnya (Pekerjaan) untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus mengetahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh sebab itu jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga tidak pergi, karena transaksi upah yang masih pergi hukumnya adalah *fasid*.

³⁹ Oni Sahroni, M. hasanuddin, *Fiqih Muamalah*...., h,27-28

d) Upah yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujroh*) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak berkurang nilainya.
- 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Adanya manfaat yang jelas.
- 4) *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adaah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.⁴⁰

Upah sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu.⁴¹

4. Syarat-Syarat Upah

- a) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah *mubah*. Tidak sah transaksi upah pada sesuatu yang tidak *mubah*, seperti *khamar*.

⁴⁰ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*....., h.129

⁴¹ Mardani, *Ibid*.h.313.

- b) Upah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi upah.
- c) Upah harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta upah
- d) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ijarah* dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.⁴²

5. Penentuan upah

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence Theory* upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya.⁴³

Islam menawarkan sebuah solusi yang bamat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini :

- 1) Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah: 279)

⁴² Mardani, *Ibid.*h.313.

⁴³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012) h.197.

- 2) Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,...(QS. An-Nahl : 90)
- 3) Abu Dzar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “mereka (budak atau pembantu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menetapkan mereka dibawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan muslim)

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.⁴⁴

Merujuk pada keterangan diatas, diajukan kepada kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain dan memberikan upah kepada yang berhak menerimanya. Upah adalah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, Muhammad Sharif Chaudhry, h.198.

⁴⁵ A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187.

Upah haruslah dibayarkan sebagaimana tertuang jelas dalam surat Ali-Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang berkerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah ditetapkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁴⁶ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Maka, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan mengidentifikasikannya dalam *nash* (Al-Quran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditentukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 167

mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikan maka digunakan *masalah mursalah*.⁴⁷

6. Bentuk upah

Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang. Tetapi dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah:

- 1) Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴⁸
- 2) Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan abik untuk buruh sendiri maupun keluarga.⁴⁹

⁴⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII, No,1 Juni 2014,(Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung), (on-Line),tersedia di:<https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=1528000667837168670&hl=en&as>(15 Juli 2019),dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴⁸ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁴⁹ Pasal 1 huruf ab Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

7. Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungnya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara beransur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁰ Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan balasan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

8. Tata cara pembayaran upah menurut peraturan pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh biasa bekerja, atau kantor perusahaan (pasal 16)

⁵⁰ Hendi Suhendi, M.Si, *Ibid*.h.121.

- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (pasal 17)
- c. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja (pasal 18)

D. Tinjauan Pustaka

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan bertujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai upah-mengupah diantaranya adalah:

1. Ria Astuti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA (BLS) (studi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakauan Ratu, Bandar Lampung, 2018). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penelian yang digunakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) belum sesuai dengan ketetapan hukum Islam ataupun menurut ketetapan pemerintah karena sistem pembayaran upah pegawai tidak

mencukupi kebutuhan hidup pegawai, apa lagi kadang terjadi keterlambatan membayar upah pegawai yang menimbulkan aksi pegawai.⁵¹

2. Pegi Prihantini, Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019) jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yakni 1 orang pemilik Panglong Kayu Jaya Abadi dan 7 orang pekerja panglong Kayu Jaya Abadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa 1. Sistem pemotongan upah pada panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung adalah sipemilik panglong tidak memberitahu kepada pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomondasi. Pada pekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi karena dia orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan ditempat lain juga susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan. 2. Perpektif hukum Islam terhadap pemotong upah tersebut adalah haram karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1

⁵¹ Ria Astuti “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA (BLS) (studi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) Way Hanakau Kec. Pakauan Ratu, Bandar Lampung, 2018).

yang menjelaskan orang yang beriman kesepakatan, adapun QS An-Nisa' (4) ayat 29 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.⁵²

3. Wiken Widya Ningrum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rva Komputer Simpur center Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019) penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sifat penelitian adalah deskriptif analitis, sumber datanya adalah data lapangan, metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad diawal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum Islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial di bumi ini yang

⁵² Pegi Prihantini, Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019)

mana membangun kehidupan atas dasar kejujuran, adil, dan saling tolong menolong.⁵³

Dalam hal ini banyak penelitian terdahulu yang membahas permasalahan mengenai upah-mengupah. Namun dalam perkembangan belum ada penelitian khusus yang membahas tentang pemotongan upah atas kerugian perusahaan sebagai masalah yang diteliti. Dengan belum tersedianya penelitian tentang pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan maka penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan keilmuan dibidang upah mengupah dalam Islam.

⁵³ Wiken Widya Ningrum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Rva Komputer Simpur center Bandar Lampung, Bandar lampung, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quránul dan Hadist

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015)

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhari, Juz III* (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1992)

Imam Abu Daud, *Sunah Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996)

Al-Jaziri Abdurahman, *Kit al-Fiqih Aa Al_Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991)

Muhammad Abduts Salam Tsafi, *Musnad al-Iman Ahmad Ibnu Hanbali, juz III*, (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiah)

B. Buku

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

al-Khafif Ali, *Ahkamal-Mua'malat al-Shar'iyah* (Beirut : Dar al-Fikr al-fikr al-Arabi)

Al Hadi Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar dkk, Miftahul Khairi *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Asyhadie H. Zaeni, S.H., M.Hum, Budi Sutrisno S.H., M.Hum., *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga. 2012)

Anwar Syamsul, MA. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007)

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

- Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012)
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djamil Faturahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001)
- Darsono. dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Ghazaly Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ghufron Ihsan dan Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- G.Kartasapoetra Danny R Agoes Rakhmat., *Ilmu Ekonomi Umum* (Bandung: Armico, 1982)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998)
- Ja'far Ahmad Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Karim Helmi, M.A, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat* (Jogjakarta: Paradigma, 2005), h.54
- Mustofa Imam, , *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- Miru Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakatra: Rajawali Pers, 2013)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia.2012)
- Musanet dan Saleh Noer, *Pedoman Pembuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989)
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* (bogor: Ghalia Indonesia 2012).
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1998)
- Nuha Ulin, *Buku Saku Fiqih Mazhab* (Yogyakarta: Al-Barokah, 2014)
- Oni Sahroni, M.A. Dr M hasanuddin, MAg, *fikih muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implemantasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- R. Subekti , R. Tjirosudibio, dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Padya Paramita, 2008)
- Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Rozalinda,M.Ag, *Fukih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan syariah* (Jakarta: rajawali Pers, 2007)
- Rahman Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989)
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syafi'I Rahmat, *Asas-Asas Hukum Mua'malat*, edisi revisi,(Yogyakarta: UII press, 2000),
- Syarifudin, Sdermayanti Hidayat, *Metodelogi Penelitian*,(Bandung: MandarMaju, 2002)
- Suhendi Hendi, M.Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)

Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013)

Sedermayanti, Hidayat Sayrifuddin. *Metode Penelitian*, (Bandung: MandarMaju, 2002)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Syarifuddin, Amir. *usul fiqh*, cetakan kesatu, (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu, 1997)

Tsafi Muhammad Abduts Salam, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu hanbali, Juz III*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah)

Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara,2007)

C. Jurnal

Rusfi Mohammad,"Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII, No,1 Juni 2014,(Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)

D. Wawancara

Uni, wawancara dengan operational manajer perusahaan, Fc smart bumi kedaton bandar lampung, 1 maret 2020

Abdurahman wawancara dengan staff kouta perusahaan, Fc smart bumi kedaton bandar lampung, 2 maret 2020

Riswan wawancara dengan staff barang perusahaan, Fc smart bumi kedaton bandar lampung, 2 maret 2020

Bayu wawancara dengan staff pengecekan barang dan uang perusahaan, Fc smart bumi kedaton bandar lampung, 2 maret 2020

Irwansyah wawancara dengan staff pengecekan barang dan uang perusahaan,
Fc smart bumi kedaton bandar lampung, 2 maret 2020